Menyemai Generasi Pembelajar[1]

Ali Maksum[2]

Education is what remains after one has forgotten
what one has learned in school
-Albert Einstein

Saya sengaja memulai tulisan ini dengan mengutip pernyataan Einstein, sebagai pengingat kita semua bahwa makna pendidikan adalah apa yang tersisa dan bersemayam pada diri seseorang ketika ia sudah tidak lagi berada di sekolah. Apakah ia masih punya kejujuran dan keluhuran moral, menghormati perbedaan, memfungsikan akal sehat dan nalarnya untuk menyelesaikan masalah, menahan diri atas godaan kenikmatan sesaat, kerja keras dan tidak putus asa menghadapi kesulitan, bahkan menjalankan aktivitas fisik dan mengatur pola makan untuk kehidupan yang sehat dan berkualitas? Sebagai pendidik kita perlu melakukan introspeksi dan refleksi atas apa yang kita lakukan selama ini. Apakah hal-hal di atas kita yakini sebagai sesuatu yang masih membekas pada diri mantan anak didik kita dan difungsikan secara terus-menerus, baik dalam lingkup dunia kerja maupun sebagai anggota masyarakat.

Pertanyaan tersebut kian penting untuk diajukan seiring tugas pendidikan kita dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, di tengah persaingan global yang intensitasnya semakin tinggi. Tuhan telah menganugerahkan kepada bangsa ini jumlah penduduk yang begitu besar, terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika. Kita juga akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2030, suatu kondisi struktur kependudukan di mana usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibanding usia nonproduktif. Diperkirakan pada kurun waktu tersebut, 70% penduduk Indonesia pada usia produktif, yang sangat menguntungkan bagi kinerja ekonomi dan kemajuan bangsa. Pengalaman yang terjadi di China dan Korea Selatan, bonus demografi berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 10-15%. Kendati demikian perlu diingat, kondisi yang dapat dikatakan sebagai berkah tersebut akan berbalik arah menjadi malapetaka jika saja banyaknya usia produktif tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, bisa jadi ujungnya justru menjadi beban bagi bangsa. Apalagi tantangan kehidupan ke depan tidak semakin ringan, persaingan semakin tajam bukan saja dengan sesama anak bangsa, tetapi juga bersaing dengan bangsa lain. Perlu disadari bahwa per 1 Januari 2016, kita telah memasuki masyarakat ekonomi Asean (MEA). Dalam konteks MEA tersebut, arus barang dan jasa, termasuk sumberdaya manusia, berlangsung secara bebas dari dan ke sesama anggota negara Asean.

Kebutuhan Masa Depan

Pertanyaannya, apakah sumberdaya manusia kita sudah siap menghadapi persaingan tersebut? Dalam konteks pendidikan, apa yang bisa kita lakukan? Perlu disadari bahwa pendidikan yang kita berikan sekarang kepada anak didik pada dasarnya untuk kebutuhan mereka 10-20 tahun yang akan datang. Sangat boleh jadi, tantangan kehidupan kala itu berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Profesi pekerjaan yang akan mereka lakukan nanti mungkin pada saat ini belum ada. Kita bisa belajar dari kasus Gojek dan taksi Uber, yang belakangan menjadi fenomenal. Banyak pihak yang kurang siap terhadap kondisi tersebut yang

---

[1] *Makalah disampaikan dalam seminar nasional "Rekonstruksi kurikulum dan pembelajaran di Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi Asean", 23-24 April 2016 di STKIP PGRI Jombang*

[2] *Penulis adalah guru besar Unesa Surabaya, Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, email: alimaksum@unesa.ac.id*

pada akhirnya berujung pada penolakan. Demikian juga banyak kita temukan sekarang, orang berusaha dan menjual suatu produk tanpa harus memiliki kantor atau toko, tetapi cukup bertransaksi lewat dunia maya. Fenomena ekonomi digital tersebut bisa jadi belum pernah terbayang pada 10-15 tahun yang lalu. Itu sebabnya, kita perlu lebih cermat melakukan telaah dan selanjutnya memprediksi kualifikasi yang dibutuhkan di masa depan. Ada kajian menarik yang dilakukan oleh World Economic Forum (2015) terkait pendidikan di abad 21, yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari kajian serupa yang telah dilakukan oleh National Research Council Amerika pada 2008. Kajian World Economic Forum menyatakan bahwa pendidikan perlu membekali para siswa dengan 16 keterampilan yang terbagi ke dalam 3 kelompok besar. Pertama adalah keterampilan dasar, yang mencakup literasi, numerasi, literasi ilmiah, literasi teknologi komunikasi, literasi finansial, dan literasi kewargaan dan budaya. Keterampilan dasar tersebut perlu diterapkan pada setiap tugas yang dilakukan. Kedua adalah kompetensi, yang meliputi kemampuan berpikir kritis/memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Ini dibutuhkan ketika siswa menghadapi tantangan tugas yang kompleks. Ketiga adalah kualitas karakter, yang mencakup keingintahuan, inisiatif, persisten, adaptabilitas, kepemimpinan, dan kesadaran sosio-kultural. Karakter ini dibutuhkan ketika siswa menghadapi lingkungan yang terus berubah.

Persoalan tersebut sejatinya sempat mengemuka saat sosialisasi kurikulum 2013, dua tahun yang lalu. Kalau dipelajari naskah akademiknya, salah satu alasan diperlukannya perubahan kurikulum adalah bertalian dengan kompetensi yang dibutuhkan seseorang diabad 21. Untuk bisa memenangkan kehidupan, seseorang harus memiliki kemampuan beradaptasi, keterampilan sosial dan komunikasi kompleks, kemampuan memecahkan masalah nonrutin, kemampuan mengembangkan diri, dan berpikir sistem (National Research Council, 2008). Intinya, seseorang harus menjadi pembelajar yang terus-menerus mengingat tantangan kehidupan juga terus berubah. Pertanyaannya, bagaimana kompetensi tersebut dapat dimiliki oleh anak didik kita?

Pendidikan bermutu sebagai kata kunci

Untuk bisa mewujudkan tujuan tersebut, kata kuncinya adalah pada pendidikan yang bermutu (Maksum, 2015c). Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan dan peraih nobel perdamaian menyatakan bahwa "*education is the most powerful weapon which you can use the change the world"*. Tentu, pendidikan di sini tidak dalam pengertian sekadar lulus dari suatu institusi pendidikan dan memperoleh ijazah, tetapi sebuah proses pendidikan yang bermutu yang memungkinkan setiap anak bangsa belajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya menuju insan paripurna. Pendidikan bermutu juga berarti memberdayakan, yakni suatu proses pendidikan yang membuat individu menjadi mandiri, mampu berpikir kritis, inovatif, berkarakter, dan berdaya saing. Peserta didik harus dianggap sebagai insan yang aktif dan dengan segenap potensi yang dimilikinya, mampu mengonstruksi pengetahuan dan pengalamannya. Sebagaimana lima pilar yang dikampayekan Unesco (2009), yakni *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to transform one self and society*. Dengan demikian, individu pembelajar tidak sekadar tahu tetapi juga mampu mengonstruksi pengetahuan, terampil menerapkan pengetahuan yang dimiliki, baik dalam konteks dirinya maupun lingkungan masyarakatnya. Setiap individu, menurut Debono (2015), memiliki kemampuan mengorganisasikan dirinya, yang kemudian disebut sebagai *self-organizing system*. Individu sebagai suatu sistem, akan mampu mengelola ikhwal dirinya untuk maju dan berkembang (Mayer, 2014). Sejalan dengan ini, fungsi institusi pendidikan adalah menciptakan lingkungan dan iklim belajar yang memungkinkan segenap potensi pembelajar teraktualisasikan. Sumber-sumber belajar seperti perpustakaan, laboratorium, buku, jurnal, dan internet cukup tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Proses pembelajaran harus mampu memberikan

inspirasi, menumbuhkan dan memperkuat rasa keingintahuan (*curiosity*) peserta didik terhadap sesuatu. Rasa keingintahuan yang kuat akan menumbuhkan budaya belajar, keberanian bertanya, dan keinginan mencipta. Kondisi yang demikian merupakan iklim yang baik bagi munculnya inovasi dan kemajuan suatu bangsa. Inilah yang dipikirkan dan dilakukan oleh Singpura, Korea, dan China, yaitu *how to instill a culture of enquiry and critical thinking into their education systems* (Leslie, 2014).

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mencerdaskan. Sebagaimana tersurat dalam pembukaan UUD 1945, pendidikan berkelindan dengan upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Esensi dasarnya adalah *to train the individual mind and to maintain personal independence*. Seseorang yang terdidik dengan baik, akan mampu menggunakan akal sehatnya dengan baik, mampu berpikir kritis dan konstruktif, serta mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara efisien dan efektif. Sayangnya, pendidikan kita selama ini cenderung membuat peserta didik sangat tergantung dengan perintah guru, sehingga peserta didik merasa inferior, miskin kreatifitas dan inovasi, dan dalam jangka panjang merusak kemampuannya mengatasi masalahnya sendiri (Maksum, 2011). Karena itu, tidak mengherankan dalam ajang kompetisi yang menguji kemampuan berpikir kritis dan kemampuan mengatasi masalah, seperti PISA (*programme for international student assessment*), dari 65 negara yang dilakukan asesmen, Indonesia ada pada peringkat 64, sementara Malaysia pada peringkat 52, Thailand 50, Singapura 2, dan China 1 (OECD, 2013). Dalam realitas kehidupan sehari-hari, indikasi rendahnya level berpikir dan kemampuan memecahkan masalah juga masih banyak terjadi di masyarakat. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang terkena penipuan berkedok investasi dan penipuan dengan modus hadiah, yang nyata-nyata tidak masuk akal sehat. Demikian juga orang begitu mudah melakukan tindak kekerasan, menyakiti, dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain karena hal yang sepele.

Dibutuhkan kesadaran yang kuat bahwa tujuan utama pendidikan bukan untuk mencari nilai atau mendapatkan ijazah. Apalagi menempuh jenjang pendidikan sekadar untuk prestise dan mendapatkan pengakuan yang sejatinya semu. Penyelenggaraan pendidikan yang sekadar berorientasi pemerolehan ijazah tanpa akuntabilitas dan proses yang benar, tidak saja melanggar ketentuan tetapi juga mendestruksi kecerdasan publik, menjadi lemah pikir yang dalam jangka panjang dapat berujung pada pembodohan bangsa. Setelah bisa dipastikan kemampuan berpikir kritis dan konstruktif terbentuk, proses berpikir perlu dijaga agar tetap jernih, jangan sampai terjadi bias atau sesat pikir. Hal yang demikian bisa terjadi apabila seseorang tidak lagi independen, misalnya karena ada muatan emosi, kepentingan pribadi, dan tekanan dari luar. Perlu diingat, sesar pikir bisa menyebabkan sesat perilaku. Hukum dan aturan sulit ditegakkan manakala berhimpitan dengan kerabat keluarga dan pertemanan yang muatan emosinya begitu kuat. Pengadaan barang dan penyelenggaraan kegiatan bisa koruptif apabila ada kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan. Demikian juga suatu kebijakan yang pruden bisa berbelok ditengah jalan jika ada intervensi atau tekanan dari luar. Intinya, pola pikir dan sikap imparsial perlu dirawat agar seseorang bisa tetap berpikir jernih dan memiliki laku jalan lurus.

Pendidikan yang bermutu juga berarti menyejahterakan. Ada relasi yang cukup kuat antara tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Pendidikan yang baik akan mengangkat derajat seseorang. Individu yang terdidik dengan baik akan dapat membuka dan menciptakan peluang bagi diri dan orang lain yang berdampak pada ekonomi. Dari aspek ekonomi, *per capita income* Indonesia sebesar 4.730 US$, sementara Thailand 9.280 US$, Malaysia 16.270 US$, Jepang 36.750, dan Singapura telah mencapai 60.110 US$ (World Bank, 2014). Dalam hal ini, kita bisa belajar dari Malaysia, Singapura, dan Korea. Bukankah pada awal kemerdekaan mereka kondisinya relatif mirip sebagai negara yang baru merdeka, yakni terjadi keterbelakangan ekonomi yang masif. Terlebih mereka tidak memiliki sumberdaya alam yang cukup

dibanding Indonesia. Sekarang bisa kita lihat bagaimana kehebatan mereka dalam kesejahteraan ekonomi. Lagi-lagi, kunci keberhasilan mereka adalah menempatkan pendidikan yang bermutu sebagai piliar utama.

Kesejahteraan tidak hanya bermakna ekonomi, melainkan juga kualitas hidup manusia yang ditunjukkan oleh kondisi kesehatan, baik fisik maupun psikis. WHO memperkirakan sekitar 70% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit nonmenular, seperti jantung, hipertensi, kardiovaskular, dan diabetes melitus, yang sebagian besar disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa jumlah penderita stroke pada 2015 meningkat lebih dari 100%. Pada tahun 2013 tercatat 12,1 penderita per 1000 penduduk, sementara pada 2015 menjadi 25-35 orang per 1000 penduduk (Kompas, 16 April 2015). Sebuah penelitian yang dilakukan di Jakarta juga menunjukkan bahwa ada 67% penduduk Jakarta mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, 95% penduduk wanita memiliki lingkar perut di atas normal, dan pada saat yang sama, 87% pria memiliki riwayat hipertensi (The Jakarta Post, May 11, 2012). Data-data tersebut berkaitan erat dengan budaya gerak, dalam hal ini olahraga, yang masih rendah. Fakta tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Komnas Penjasor 2011 bahwa tingkat kebugaran jasmani remaja kita (14-17 tahun) sangat memprihatinkan, putra 33,66 ml/kg/min dan putri 24,23 ml/kg/min. Secara rinci, untuk remaja putra, 56% kategori sangat rendah, 15% kategori rendah, 23% kategori sedang, dan hanya 6% masuk kategori baik ke atas. Sementara untuk putri, 64% masuk kategori sangat rendah, 30% kategori rendah,3% kategori sedang, dan hanya 2% masuk kategori baik.

Pendidikan yang bermutu juga mengandung makna memanusiakan. Istilah “memanusiakan” penting untuk digaris bawahi mengingat seseorang bisa kehilangan kemanusiaannya manakala *limbic system* yang merupakan *locus* berprosesnya syahwat “kebinatangan” tidak terkelola dan terdidik dengan baik. Nafsu ingin menguasai, menghancurkan orang lain yang tidak sejalan, keserakahan ekonomi, termasuk libido ada di wilayah ini. Karena itu, kesanggupan untuk menahan dan mengelola syahwat-syahwat instinktif yang dapat mendistorsi sifat kemanusiaan perlu dirawat. Acapkali kita tidak tahan atas godaan kemewahan dan kenikmatan di sekitar kita, apakah itu berupa kedudukan, rekognisi sosial, materi, bonus, komisi, dan bentuk gratifikasi lainnya. Eksperimen klasik Walter Mischel terhadap sekelompok anak usia 4-5 tahun sungguh menarik untuk disimak. Anak-anak dimasukkan ke dalam ruangan, duduk secara beraturan, dan di hadapan setiap anak disediakan *marhsmello* (semacam permen-coklat). Mereka diberi dua opsi, pertama, ketika bel berbunyi anak-anak boleh langsung makan *marhsmello* tersebut, atau opsi kedua menahan diri sampai 15 menit hingga eksperimenter datang dan memberikan *marhsmello* dua kali lipat. Ada sebagian yang memilih opsi pertama dan sebagian yang lain memilih opsi kedua. Seteleh mereka remaja dan dewasa dicek lagi, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bisa menunda kenikmatan (*delayed gratification*) bisa lebih sukses dikemudian hari, baik dalam akademik, kompetensi sosial, dan kemampuan menghadapi tekanan, dibanding dengan mereka yang tidak dapat menahan diri (Maksum, 2014).

Mempelajari sejumlah data dan kasus belakangan ini, membuat kita perlu melakukan introspeksi. Laku keserakahan sebagian bangsa ini masih begitu kuat dan ini dapat dilihat dari indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga *Transparency International* tahun 2014, Indonesia ada pada peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei dengan skor 34 pada rentang skala 0-100. Sementara Philipina dengan skor 38, Malaysia 52, Jepang 76, dan Singapura 84. Demikian juga dalam penyalahgunaan narkotika, BNN memprediksi prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada 2015 mencapai 5,1 juta orang dan sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Tentu, hal ini sangat mengkawatirkan, kita berada dalam darurat narkoba. *The last but not least* adalah soal terorisme yang menghentak kemanusiaan. Kelompok radikal yang menggunakan emosi agama ini, tanpa disadari ideologinya telah menelisik jauh pada sejumlah remaja kita. Mereka menganggap kebenaran ada pada dirinya dan pihak yang berbeda dianggap salah dan

absah untuk dihancurkan. Sejatinya mereka merupakan anak-anak yang baik, tetapi salah asuhan dan salah jalan menempuh kekerasan “suci” untuk memperoleh “surga”.

Pembelajaran Emosi

Pada kesempatan ini saya ingin memberikan penekanan khusus terkait dengan pembelajaran emosi. Ada laporan menarik yang dibuat oleh World Economic Forum (2016) yang bertajuk *New vision for education, fostering social and emotional learning through technology*. Tentu bukan tanpa alasan jika lembaga internasional yang kredibel ini menurunkan laporan dengan tajuk seperti itu. Ada semacam kegalauan global terkait dengan perkembangan dewasa ini. Seiring waktu, orang yang mengalami gangguan mental seperti stress dan depresi semakin banyak, peredaran narkoba intensitasnya semakin tinggi, dan aksi terorisme juga tidak semakin surut. Diduga hal yang demikian terjadi sebagai akibat mereka tidak adaptif terhadap perubahan. Padahal perubahan menjadi sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari lagi, apalagi dengan masifnya penggunaan teknologi komunikasi. Kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan, meski tidak semua perubahan bisa dengan segera kita dapatkan manfaatnya. Justru banyak ditemukan, perubahan baru bisa dirasakan manfaatnya dalam ukuran tahun. Karena itu, dalam menghadapi kondisi yang demikian dibutuhkan ketahanan emosi. Ketika seseorang merasa tidak mampu lagi mengikuti perubahan yang terjadi, maka bisa menimbulkan stress, dan jika stress tidak dapat dikelola dengan baik, maka dapat berdampak pada hal-hal yang bersifat destruktif, seperti rendah diri, depresi, bahkan sampai pada bunuh diri. Individu juga harus sadar bahwa ia tidak hidup dalam ruang hampa. Ia berdampingan dengan orang lain yang bisa jadi berbeda dengan dirinya, baik dalam cara berpikir, bersikap, dan memilih jalan hidup. Karena itu, dibutuhkan kesadaran sosial dan kultural di antara sesama sehingga tumbuh toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Di sinilah pentingnya pembelajaran emosi bagi peserta didik. Pembelajaran emosi mengajarkan kepada siswa menjadi sadar diri dan sadar sosial, mampu mengambil keputusan secara bertaggung jawab, dan kompeten dalam mengelola diri yang berujung pada kesuksesan akademik dan kehidupan.

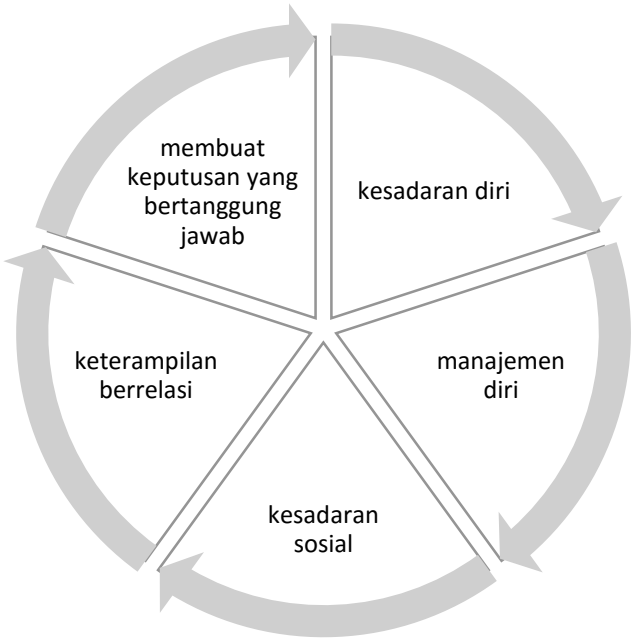

Komponen Pembelajaran Emosi (Fried, S., 2015)

Secara epistemologis, emosi dapat didefinisikan sebagai fenomena psikologis multifaktor yang melibatkan komponen afektif, kognitif, fisiologis, motivasi, dan ekspresi (Shuman and Scherer, 2014). Seorang siswa yang akan menjalani ujian, mungkin dia khawatir dan mengalami parasaan yang tidak enak (afektif), takut gagal dalam ujian karena mendapatkan nilai yang jelek (kognitif), denyut jantungnya meningkat (fisiologis), ada keinginan menghindari keadaan tersebut (motivasi), dan menampakkan wajah yang cemas (ekspresi). Sekolah, termasuk di dalamnya kelas, merupakan tempat pembelajaran emosi yang bagus. Hampir setiap sekuen kegiatan di sekolah syarat dengan fenomena emosi, baik yang bersifat positip seperti senang dan bahagia maupun yang bersifat negatip seperti takut, cemas, dan marah. Ada lima komponen dasar dalam pembelajaran emosi:

1. Kesadaran diri (*self-awareness*): setiap individu perlu menyadari bahwa dalam dirinya terdapat emosi, baik yang bersifat positip maupun negatip. Siswa perlu mengenal emosi yang dimiliki dan pengaruhnya terhadap perilaku. Mereka memahami apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya serta memiliki rasa percaya diri.
2. Manajemen diri (*self-management*): Individu tidak bisa menghalangi munculnya emosi yang bersifat alamiah, seperti perasaan benci dan marah. Yang dibutuhkan, siswa memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilakunya, termasuk stress, memotivasi diri, pengaturan tujuan, dan kemajuan dalam pencapaian tujuan.
3. Kesadaran sosial (*social awareness*): Perlu disadari bahwa individu tidak hidup dalam ruang yang vakum, tetapi mengalami hidup bersama bersama orang lain. Karena itu, siswa perlu berempati dan mengambil perspektif dari orang yang berbeda. Mereka juga perlu memahami norma sosial dan etis serta mengenal lingkungan jejaringnya.
4. Keterampilan berrelasi (*relationship skills*): Dalam kehidupan sosial, individu perlu berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Siswa perlu diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan jelas, mendengar secara aktif, bekerjasama, negosiasi konflik, tahan terhadap tekanan sosial yang tidak sesuai, dan berusaha mencari dan menawarkan bantuan.
5. Membuat keputusan yang bertanggungjawab (*responsible decision making*): Setiap hari seseorang akan dihadapkan pada situasi di mana ia harus mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, siswa perlu mempertimbangkan standar etik, peduli keselamatan, norma sosial, konsekuensi realistik, dan merasa nyaman dalam menentukan pilihan perilaku yang konstruktif dan bermartabat.

Pembelajaran emosi pada siswa menjadi semakin penting seiring perubahan dan perkembangan yang acapkali susah diprediksi. Menurut World Economic Forum (2016), diperkirakan 65% anak-anak didik sekarang akan memasuki dunia kerja yang sekarang belum ada, dan transformasi tersebut membutuhkan keterampilan sosial dan emosional seperti kreativitas, inisiatif, dan adaptabilitas. Para ekonom juga berpendapat bahwa munculnya pasar kerja baru memerlukan pekerja yang mampu memecahkan masalah yang tidak terstruktur, bekerja dengan informasi baru, dan melakukan sesuatu tugas yang tidak rutin (Deming, 2015). Untuk menyiapkan sumberdaya manusia dengan kualitas tersebut tentu dibutuhkan perencanaan dan eksekusi yang tepat, termasuk memberikan bekal yang memadai bagi peserta didik. Model pembelajaran emosi sudah banyak dipraktekkan di sejumah negara seperti Amerika, Korea Selatan, dan China. Hasil meta-analisis terhadap 213 penelitian yang melibatkan lebih dari 270 ribu siswa menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan pembelajaran emosi mengalami peningkatan yang signifikan dalam prestasi akademik dan dalam jangka panjang berpotensi berdampak positip dalam dunia kerja, termasuk kemampuan mengelola stress (Durlak, et al., 2011). Penelitian yang bersifat *cost-benefit analysis*

menunjukkan bahwa investasi 1$ pada program pembelajaran emosi akan berkembang (*average return*) menjadi 11$ (Belfield, et al., 2015). Survei membuktikan bahwa lebih dari 90% orangtua dan guru di China, 81% orangtua dan 78% guru di Amerika menerapkan program ini (Fried, 2015).

Peran Strategis Guru

Dalam konteks pembelajaran di sekolah, peran guru menjadi sangat sentral (Maksum, 2015b). Disadari bahwa sebagai sebuah sistem, keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat makroskopik maupun mikroskopik, seperti kebijakan negara, anggaran, kurikulum, sarana prasarana, peserta didik, dan guru. Meski demikian, dari sejumlah telaah dan hasil penelitian, kualitas guru menjadi faktor krusial yang paling menentukan kualitas pendidikan suatu bangsa. Pertanyaannya, bagaimana kualitas guru di Indonesia? Beberapa data dapat dikemukakan: hasil uji kompetensi terhadap 1,6 juta guru oleh Kemdikbud 2015 menunjukkan bahwa 1,3 juta guru (81%) mendapatkan nilai di bawah 60, hanya 192 guru (0,01%) yang nilainya 90-100, dan sekitar 130 ribu guru mendapatkan nilai 0-30 (8,13%). Kondisi ini belum mengalami perubahan yang signifikan dibanding data uji kompetensi 2012 yang reratanya mencapai 46,41. Dari sisi jumlah guru yang berimplikasi pada rasio guru-siswa, kita patut berbangga karena rasio guru-siswa Indonesia tergolong sangat baik. Untuk rasio guru-siswa SD adalah 1:20, lebih baik dibandingkan Thailand, China, dan Korea. Demikian juga untuk rasio guru-siswa SMP Indonesia mencapai 1:14, lebih baik dibanding Korea, Inggris, dan bahkan Amerika Serikat. Tampaknya, belum ada korelasi antara jumlah dan mutu guru, termasuk implikasinya pada mutu pendidikan. Artinya, dari sisi jumlah, guru di Indonesia sudah lebih dari cukup, persoalan utamanya justru pada mutu (Maksum, 2015a).

Upaya peningkatan mutu guru telah dan terus dilakukan, diantaranya melalui program sertifikasi. Program ini sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, yang selanjutnya berujung pada perbaikan mutu anak didiknya. Guru yang telah dianggap memenuhi kelayakan sesuai standar mutu yang ditentukan, akan mendapatkan sertifikat. Sebagai konsekuensinya, guru yang telah lolos sertifikasi akan mendapatkan insentif satu kali gaji setiap bulannya. Pertanyaannya, apakah program tersebut efektif? Hasil penelitian Bank Dunia (2012) membuktikan bahwa program sertifikasi guru hanya berdampak pada dua hal, yakni peningkatan pendapatan guru dan menguatnya animo calon mahasiswa untuk masuk ke LPTK. Meski program sertifikasi guru menghabiskan biaya yang tidak sedikit, sekitar 70 trilyun, namun hasilnya belum berdampak langsung pada kualitas guru dan pendidikan secara keseluruhan. Meski ada sejumlah siswa kita yang berprestasi dalam olimpiade matematika dan sains tingkat internasional, namun secara umum prestasi siswa kita masih jauh dari harapan. Dalam ajang kompetisi yang mengukur kemampuan berpikir kritis dan mengatasi masalah, PISA (*programme for international student assessment*) pada 2013, menunjukkan bahwa dari 65 negara, Indonesia ada pada peringkat 64, sementara Malaysia ke 52, Thailand ke 50, Singapura ke 2, dan China ke 1.

Bagaimana mewujudkan guru-guru yang bermutu? Masalah mutu guru seolah menjadi persoalan klasik yang tak pernah mendapat penyelesaian secara komprehensif. Beberapa upaya dilakukan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi, namun hasilnya belum berdampak secara signifikan pada mutu guru. Perlu ditelaah secara mendalam mengapa sejumlah program yang dilakukan tidak cukup efektif. Saya menduga, ada ketidaktepan strategi yang digunakan. Sejumlah program yang selama ini dijalankan lebih menitikberatkan pada intervensi eksternal seperti peningkatan pendapatan, kenaikan pangkat, dan perbaikan karier, tetapi kurang menyentuh pada substansi kedirian dari para guru seperti kebermaknaan profesi, tanggung jawab pada masa depan anak-anak bangsa, kewajiban diri untuk senantiasa memutakhirkan pengetahuan, dan kesederhanaan dalam kehidupan.

Tentu tidak salah negara memberikan kesejahteraan bagi para guru, persoalannya kita belum bisa mengaitkan program yang demikian itu dengan upaya pemberdayaan yang berbasis pada diri guru sendiri. Tambahan pendapatan seyogyanya diarahkan pada belanja investatif yang mengarah pada penguatan profesionalitas sebagai pendidik, bukan pada hal-hal yang sifatnya konsumtif. Seberapa pun besarnya gaji guru jika itu tidak membuat mereka berdaya, maka tidak banyak yang bisa diharapkan. Pemberdayaan di sini mengarah pada penguatan prakarsa dan kemampuan kritis yang memungkinkan para guru mengembangkan diri secara bertanggung jawab. Dalam *law of diminishing return* (Whyte, 2015), dinyatakan bahwa perbaikan optimal akan terjadi disaat awal dan seiring waktu akan mengalami penurunan. Meski semakin baik individu memperoleh hasil, akan semakin keras individu memperbaiki kinerjanya. Namun, relasi antara keduanya tidak linier. Berdasarkan hasil penelitiannya, Pink (2009) menyatakan bahwa *reward* dalam bentuk uang hanya menawarkan peningkatan kinerja jangka pendek, dalam jangka panjang justru mendistorsi kesungguhan upaya seseorang.

Guru harus menjadi manusia pembelajar, tidak cukup sekadar puas menerima bekal disaat menempuh pendidikan di LPTK, atau merasa sudah pernah membaca materi yang diajarkan di kelas, sehingga tidak perlu lagi memutakhirkan pengetahuan yang mereka miliki. Perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat, apa yang dianggap benar pada saat yang lalu sangat boleh jadi sudah dirasa tidak tepat lagi pada masa sekarang. Dalam konteks tertentu, peran guru diharapkan juga sebagai peneliti, dalam hal ini adalah melakukan penelitian tindakan kelas. Guru perlu mempelajari lebih dalam, mengapa proses pembelajaran yang dilakukan kurang efektif untuk mencapai tujuan? Misalnya, perubahan perilaku siswa, peningkatan keterampilan berpikir, dan penguasaan materi ajar. Masalah yang demikian akan bisa dipecahkan apabila seorang guru kreatif dan inovatif mengeksplorasi pendekatan dan strategi pembelajaran. Guru berpikir dan melakukan identifikasi apa sejatinya yang menjadi masalah. Ketika akar masalah sudah ditemukan, maka direncanakan solusinya, dilaksanakan, dan dievaluasi. Dari siklus kegiatan yang demikian, maka guru terbiasa membaca, menulis, dan menemukan sesuatu dari apa yang dilakukan. Hal yang demikian perlu dilakukan secara terus-menerus (*continuous improvement*). Di sinilah esensi dari guru sebagai insan pembelajar. Kegiatan membaca tidak hanya konstruktif bagi pengembangan pengetahuan, tetapi juga positif untuk merawat memori. Hasil penelitian Robert Wilson et.al (2013), neurologist dari Rush University Chicago, memberikan bukti empirik. Mereka meneliti 300 orang lanjut usia dengan memeriksa kapasitas memori dan keterampilan berpikirnya setiap tahun. Mereka juga ditanya mengenai kebiasaan, menulis, dan aktifitas kognitif lainnya, termasuk saat masa anak-anak dan remaja. Mereka diikuti perkembangannya sampai meninggal dan selanjutnya diperiksa kondisi otaknya untuk membuktikan adanya demensia. Hasil penelitian cukup mengejutkan bahwa individu yang jarang membaca dan menulis, mengalami penurunan fungsi kapasitas mental 48% lebih cepat dibanding mereka yang aktif membaca dan menulis. Karena itu, mari kita semua menjadikan kebiasaan membaca dan menulis sebagai gaya hidup, yang tidak saja berpengaruh pada profesionalisme sebagai guru, tetapi juga meninggikan kualitas hidup kita sebagai manusia.

Langkah berikutnya adalah memberikan pembinaan profesi secara berkelanjutan. Dalam banyak kasus, amat jarang guru mendapatkan pembinaan yang mengarah pada penguatan profesi. Idealnya, setiap 6 bulan sekali. Pembinaan bisa mengarah pada *teaching skill*, pemutakhiran pengetahuan, dan pembinaan kepegawaian. Selain itu, perlu ada kesadaran dan komitmen yang kuat bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia yang syarat dengan pengabdian. Ukurannya bukan pada seberapa besar gaji yang mereka peroleh, melainkan pada sumbangsih yang diberikan guru dalam mendidik anak-anak bangsa meraih masa depan yang lebih baik. Penting untuk diingat bahwa pendidikan adalah instrumen peradaban, selebihnya hanya kuratif dan remedial. Jika suatu bangsa mengalami kegagalan dalam peradaban, misalnya, korupsi

merajalela dan terjadi hampir di setiap transaksi pelayanan publik, kedisiplinan yang rendah, dan penyimpangan perilaku yang tinggi adalah sebagian contoh dari kegagalan pendidikan.

Dalam konteks membangun peradaban yang mengedepankan intelektual dan moral, masih banyak hal yang harus kita lakukan. Praktek pendidikan kita acapkali masih diwarnai tindakan nirkeluhuran. Sebagai ilustrasi, saya ingin menyoal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi SD sampai SLTA. Sempat ada perdebatan yang tajam terkait urgensi UN sebagai penentu kelulusan. Ada yang berpendapat bahwa banyaknya kecurangan dalam UN disebabkan karena UN dijadikan penentu kelulusan. Mereka berpendapat, untuk mencegah kecurangan, UN cukup digunakan sebagai pemetaan mutu pendidikan. Pertanyaannya, apakah dengan UN sekadar sebagai pemetaan akan menghapus kecurangan? Tampaknya hal yang demikian masih jauh panggang dari api. Data Litbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa lebih dari 80% sekolah memiliki indeks integritas UN kurang dari 80. Artinya, masih banyak persoalan terkait dengan integritas siswa, termasuk sangat bolehjadi gurunya, dalam melaksanakan UN. Akar persoalannya ada pada defisit kejujuran, bukan sekadar pada pilihan sistem. Sebab, sistem apapun tidak akan mampu menampung ketidakjujuran orang. Kejujuran masih menjadi barang mahal, padahal kejujuran adalah landasan pengembangan karakter. Rasanya akan sia-sia berbagai upaya perbaikan pendidikan dilakukan jika dipenghujung perjalanan, para siswa menyaksikan bahkan diarahkan pada praktik kecurangan berjamaah. Dalam konteks ini, komitmen guru untuk menjaga dan merawat moral kejujuran peserta didik menjadi urgen, bukan justru mengajarkan sebaliknya, praktik ketidakjujuran secara sistematis oleh guru di ruang kelas saat ujian.

Catatan Akhir

Perubahan dan persaingan merupakan sebuah keniscayaan kehidupan, baik dalam skala lokal maupun global. Kita tidak bisa menghindar apalagi menolaknya, yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan anak bangsa dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dalam kaitan ini, pendidikan bermutu merupakan instrumen yang efektif untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pendidikan bermutu bisa terwujud manakala dalam prosesnya hadir guru yang bermutu juga. Peserta didik perlu terus belajar, guru pun juga tidak boleh berhenti untuk belajar. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan sosiolog kenamaan Amerika Benjamin Barber, bahwa tidak ada individu yang bisa dikategorikan lemah atau kuat, tidak ada individu yang bisa dikategorikan sukses atau gagal, yang ada adalah individu yang mau belajar dan tidak mau belajar. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali belajar, belajar, dan belajar guna mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Belfield, C. et.al (2015). *The economic value of social and emotional learning*. Center for benefit-cost studies in education, Teachers College, Colombia University.

Debono, E. (2015). *Serious creativity: How to be creative under pressure and turn ideas into action*. London: Vermilion.

Deming, D.J. (2015). *The growing importance of social skill in the labor market*. Harvard University and NBER.

Durlak, J.A. et.al. (2011). *The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions*, Child Development, volume 82.

Fried, S. (2015). *Social and emotional learning*. Massachusetts: Rennie Center for Education Research & Policy.

Kompas (2015). *Ancaman saat tubuh menua*, edisi 16 April, h.14

Leslie, I. (2014). *Curious: The desire to know and why your future depends on it*. London: Quercus.

Maksum, A. (2015a). *Guru bermutu, pendidikan maju*. Makalah disampaikan dalam orasi ilmiah pada wisuda sarjana Universitas Ronggolawe Tuban pada 27 Desember 2015.

Maksum, A. (2015b). *Mutu guru dan penguatan LPTK*. Makalah disampaikan dalam orasi ilmiah pada wisuda ke 12 program sarjana STKIP-BIM Surabaya, 8 Agustus 2015 di Dyandra Convention Center Surabaya.

Maksum, A. (2015c). *Kurikulum dan pembelajaran di Perguruan Tinggi: Menuju pendidikan yang memberdayakan*. Makalah disampaikan dalam seminar nasional hasil penelitian pendidikan dan pembelajaran, 25-26 April 2015 di STKIP PGRI Jombang.

Maksum, A. (2014). *National mental model and competitiveness: Transformation toward achieving and progressive behavior*. Anima, Indonesian Psychological Journal, vol. 29, no. 2.

Maksum, A. (2011). *Membangun mental prestatif: Tugas utama pendidikan ke depan*. Dalam Sirkit Syah dan Martadi, "Rekonstruksi Pendidikan". Surabaya: Unesa University Press.

Mayer, J.D. (2014). *Personal intellegence: The power of personality and how it shapes our lives*. New York: Scientific American/Farrar, Straus and Giroux.

National Research Council (2008). Research on future skills demands: *A Workshop Summary*. M. Hilton, Rapporteur. Center for Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.

OECD (2015). *Skills for social progress: The power of social and emotional skills*. Tersedia di http://www.oecd.org/

OECD (2013). *PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and what they can do with what they know*.

Pink, D.H. (2009). *Drive: The surprising thruth about what motivates us*. New York: Riverhead Books.

Shuman, V. & Scherer, K.R. (2014). Concept and structure of emotion. In Reinhard Pekrun "*International handbook of emotion in education*", New York: Routledge.

The Jakarta Post (2012). *Study shows 67 percent of Jakartans overweight*, Edisi 11 Mei.

Unesco (2009). *Education for Sustainable Development*. France: Division for the coordination of United Nations priorities in education.

Whyte, G. (2015) *Achieve the impossible*. CA, USA: Bantam Press.

Wilson, R., et al. (2013). Life-span cognitive activity, neuropathologic burden, and cognitive aging. *Neurology*, vol. 81, no. 4

World Economic Forum (2016). *New vision for education: Fostering social and emotional learning through technology*. Prepared in collaboration with The Boston Consulting group.

World Bank (2014). *World development indicators*. Washington: International Bank for Reconstruction and Development.

World Bank (2012). *Teacher certification in Indonesia: A doubling of pay or a way to improve learning*. Jakarta: Human Development Sector.

View publication stats